



RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



MELAYANI DENGAN PRIMA

Alamat :
Jalan MT. Haryono Nomor 10 Batusangkar



(0752) 574715



08116616149



www.pmpstsp.tanahdatar.go.id



1708



dpmpstspstanahdatar@gmail.com



dpmpstspstanahdatar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridhanya maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dirasa perlu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar merumuskan Rencana Kerja untuk menjabarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi pada tahun 2025. Keberhasilan ini akan dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah perencanaan yang baik.

Perumusan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar ini masih jauh dari apa yang diharapkan, oleh karenanya sangat diharapkan sekali kritikkan dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Batusangkar, Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



STOFA NOFA BUDIANTO,SH
NIR 19740612 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 LATAR BELAKANG 1

 1.2 LANDASAN HUKUM 3

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 TAHUN 2025 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025 16

BAB IV PENUTUP 29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun. Renja OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun perencanaan tahunan yang bersumber dananya dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Disamping itu Renja OPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 351 mengamanatkan Kepala daerah wajib menyusun dan menyempurnakan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah (Perubahan Renja PD) dengan berpedoman pada rancangan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (Perubahan RKPD). RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, OPD dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan dan pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan RKPD.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 telah melaksanakan program kegiatan prioritas untuk mendukung target pembangunan pemerintah daerah maupun target rencana kerja DPMPTSP Tahun 2025 melalui kegiatan yang nyata dalam mendukung pembangunan khususnya bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu adanya tambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 agar target kinerja dapat dicapai sampai dengan akhir Tahun 2025. Maka perlu disusun Perubahan Renja Dinas PMPTSP Tahun 2025 ini yang digunakan sebagai dasar dan bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025.

Dengan adanya Perubahan Rencana kerja ini maka seluruh proses kegiatan pelaksanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan dengan sistem yang jelas dan terukur, baik dari segi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai pedoman perencanaan program/ kegiatan tahun 2025 yang dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (PRKA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang strategis di Kabupaten Tanah Datar guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan

Pembangunan, kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja OPD merupakan proses penyesuaian/ penyempurnaan kegiatan tahunan dan Indikator Kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2021-2026 dan hasilnya dari proses ini adalah berupa Perubahan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar.
2. Perencanaan Kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan target kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.
3. Secara Umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.
4. Perubahan Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan Program Kegiatan ke dalam KUA PPAS Perubahan dan Perencanaan Program kegiatan yang akan dimasukkan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (PRKA) tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Perubahan Renja SKPD tahun 2025, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja SKPD, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan, membuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perubahan pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja Tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 di mana indikator program dan target Renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar.

Sampai dengan Triwulan II penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar secara garis besarnya telah sesuai dengan yang ditargetkan, walaupun pada beberapa program dan kegiatan beserta sub kegiatan tidak dapat berjalan sebagaimana yang ditergetkan, tetapi hal ini lebih dikarenakan adanya perubahan kebijakan baik di lingkungan Kabupaten Tanah Datar maupun di dalam SKPD sendiri.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai mana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

Tabel 2.1 (Formulir E.81)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah PJMD Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)= 6÷12		(14) = 13 / 5 × 100		(13)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			100	41.860.535.000	100	23.412.701.960	100	5.281.755.742	20,84	1.100.532.239	21,63	1.142.354.084	0,00	0	0,00		42,46	2.242.886.323	71	25.655.588.283	71,23	61,29	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	32.123.766.000	100	19.121.414.832	100	4.432.071.258	22,41	993.383.139	23,68	1.049.303.484	0,00	0	0,00	0	46,09	2.042.686.623	73	21.164.101.455	73,04	65,88	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	191.989.450	100	60.975.100	100	5.628.000	59,00	1.528.400	12,29	1.229.200	0,00	0	0	0	47,53	2.757.600	49	63.732.700	49,18	33,20	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,00	54.999.875	100,00	19.689.050	100,00	5.000.000	18,01	900.500	24,58	1.229.200	0,00	0	0		42,59	2.129.700	143	21.818.750	142,59	39,67	Dinas PMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	100,00	81.989.800	100,00	29.375.450											0,00	0	100	29.375.450	100,00	35,83	Dinas PMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100,00	54.999.775	100,00	11.910.600	100,00	628.000	99,98	627.900	0,00	0	0,00	0	0		99,98	627.900	200	12.538.500	199,98	22,80	Dinas PMPTSP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	22.711.127.375	100	15.330.792.505	100	3.748.984.167	49,76	924.152.122	12,41	930.324.416	0,00	0	0,00	0	62,18	1.854.476.538		17.185.269.043	62,18	58	
		Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	100,00	22.642.127.600	100,00	15.304.048.105	100,00	3.746.984.167	24,62	922.654.122	24,83	930.324.416	0,00		0		49,45	1.852.978.538	149	17.157.026.643	149,45	75,77	Dinas PMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	100,00	68.999.775	100,00	26.744.400	100,00	2.000.000	74,90	1.498.000	0,00	0	0,00	0	0		74,90	1.498.000	175	28.242.400	174,90	40,93	Dinas PMPTSP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	60.000.000	100	24.500.000	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0		24.500.000	0,00	29,22	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100			6.970.000		0								0,00	0	0	6.970.000	0,00			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah FJMD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)= 6*12		(14) = 13 / 5 * 100		(13)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	100,00	60.000.000	100,00	17.530.000	100,00	0								0,00	0	100	17.530.000	100,00	29,22		Dinas PMPTSP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	700	2.797.648.425	100	715.036.760	100	116.197.420	1,27	4.581.650	14,11	16.525.250	0,00	0	0,00	0	13,19	21.106.900		736.143.660	13,19	21,41	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100,00	178.749.300	100,00	31.871.800	100,00	4.000.000	0,00	0	16,25	650.000	0,00		0	0	16,25	650.000	116	32.521.800	116,25	18,19	Dinas PMPTSP
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,00	865.000.000		221.299.457	100,00	36.970.000	0,00	0	0,00		0,00		0	0	0,00	0	0	221.299.457	0,00	25,58	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	100,00	324.605.900	100,00	77.254.800	100,00	6.227.420	0,00	0	35,24	2.194.500	0,00	0	0	0	35,24	2.194.500	135	79.449.300	135,24	24,48	Dinas PMPTSP
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	100,00	318.793.575	100,00	42.661.800	100,00	7.000.000	0,00	0	11,74	822.000	0,00		0	0	11,74	822.000	112	43.483.800	111,74	13,64	Dinas PMPTSP
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	780 Dokumen	100,00	79.500.000	100,00	11.160.000		0	0,00							0,00	0	100	11.160.000	100,00	14,04	Dinas PMPTSP	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	100,00	309.246.650	100,00	30.896.750	100,00	2.000.000	0,00	0	0,00		0,00	0	0	0	0,00	0	100	30.896.750	100,00	9,99	Dinas PMPTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	100,00	721.753.000	100,00	299.892.153	100,00	60.000.000	7,64	4.581.650	21,43	12.858.750	0,00		0	0	29,07	17.440.400	129	317.332.553	129,07	43,97	Dinas PMPTSP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	2.405.000.000	100	998.976.402	100	113.030.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	998.976.402	100	61	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		100	1.455.000.000		268.700.000	100	0		0						0,00	0	0	268.700.000	0,00	18,47	Dinas PMPTSP	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100,00	550.000.000	100,00	262.792.502	100,00	0	0,00	0	#DIV/0!	0	0,00		0	0,00	0	0	262.792.502	0,00	47,78	Dinas PMPTSP	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100	400.000.000	100	467.483.900	100	113.030.000	0,00	0	0,00		0,00		0	0,00	0	100	467.483.900	100,00	116,87	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%		1.531.299.000	100	567.201.263	100	235.264.462	10,22	36.089.017	47,60	49.913.618	0,00	0	0,00	0	57,82	86.002.635		653.203.898	57,82	105,22	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	100,00	49.299.000	100,00	7.985.000	100,00	500.000	0,00	0	100,00	500.000	0,00	0		100,00	500.000	200	8.485.000	200,00	17,21	Dinas PMPTSP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,00	785.000.000	100,00	239.438.063	100,00	125.000.000	15,97	19.963.417	15,94	19.929.218	0,00		0		31,91	39.892.635	132	279.330.698	131,91	35,58	Dinas PMPTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dan Pembayaran Honor THL	4 Laporan, 14 Bulan	100,00	697.000.000	100,00	319.778.200	100,00	109.764.462	14,69	16.125.600	26,86	29.484.400	0,00		0		41,55	45.610.000	142	365.388.200	141,55	52,42	Dinas PMPTSP

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah PJMD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)= 6+12		(14) = 13 / 5 * 100		(13)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%		2.426.701.750	100	1.423.932.802	100	212.967.209	8,34	27.031.950	15,96	51.311.000	0,00	0	0,00	0	24,30	78.342.950	124	1.502.275.752	24,30	53,63	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit, 14 Bulan	100,00	1.253.609.750	100,00	691.049.602	100,00	111.590.409	17,00	18.969.150	29,00	32.359.300	0,00	0	0	0	46,00	51.328.450	146	742.378.052	146,00	59,22	Dinas PMPTSP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	100,00	328.094.000	100,00	62.937.400	100,00	1.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	100	62.937.400	100,00	19,18	Dinas PMPTSP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit, 14 Bulan	100,00	844.998.000	100,00	669.945.800	100,00	100.376.800	8,03	8.062.800	18,88	18.951.700	0,00	0	0	0	26,91	27.014.500	127	696.960.300	126,91	82,48	Dinas PMPTSP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				1.235.999.775	100	307.131.400	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	100	307.131.400	0,00	7,12		
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah				575.999.975		41.003.000														41.003.000		7,12	
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		100	575.999.975	100	41.003.000		0	0,00			0		0				100	41.003.000	100,00	7,12		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		%		659.999.800	100	266.128.400	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100	266.128.400	0,00	20,16	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		100	659.999.825		72.434.000		0								0,00	0	0		72.434.000	0,00	10,97	Dinas PMPTSP
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100,00	659.999.800	100,00	193.694.400	100,00									0,00	0	100	193.694.400	100,00	29,35	Dinas PMPTSP	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					100	481.418.146	100	200.000.000	0,00	0	0,22	440.000	0,00	0	0	0	0,22	440.000	100	481.858.146	0,22	36,64	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewengan Daerah Kabupaten/ kota		%		1.315.000.000	100	481.418.146	100	200.000.000	0,00	0	0,22	440.000	0,00	0	0	0	0,22	440.000	100	481.858.146	0,22	36,64	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100,00	1.315.000.000	100,00	481.418.146	100,00	200.000.000	0,00	0	0,22	440.000	0,00	0	0	0	0,22	440.000	100	481.858.146	100,22	36,64	Dinas PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				2.867.097.675	100	1.174.557.700	100	568.500.000		103.117.700		78.778.250		0	0	0	19,43	181.895.950	119	1.356.453.650	19,43	38,88	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		%		2.867.097.675	100	1.174.557.700	100	568.500.000	6,42	103.117.700	13,01	78.778.250	0,00	0	0	0	19,43	181.895.950	119	1.356.453.650	19,43	38,88	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah FJMD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
									(8)		(9)		(10)		(11)											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)= 6+12		(14) = 13 / 5 * 100		(13)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan berusaha berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	700 Pelaku Usaha, 14 Bulan	100,00	1.165.749.775	100,00	712.831.300	100,00	535.000.000	19,27	103.117.700	13,28	71.057.000	0,00	0	0	0	0	32,56	174.174.700	133	887.006.000	132,56	76,09	Dinas PMPTSP
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	12 Orang	100,00	273.299.950	100,00	25.968.300	100,00	3.500.000	0,00	0	0,00		0,00	0	0	0	0	0,00	0	100	25.968.300	100,00	9,50	Dinas PMPTSP
		Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	120 Kegiatan Usaha	100,00	1.428.047.950	100,00	435.758.100	100,00	30.000.000	0,00	0	25,74	7.721.250	0,00	0	0	0	0	25,74	7.721.250	126	443.479.350	125,74	31,05	Dinas PMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				3.229.421.775	100	1.697.660.857	100	71.184.484	3,21	4.031.400	0,00	13.832.350	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	17.863.750	#DIV/0!	1.715.524.607	#DIV/0!	46,53		
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%		3.229.421.775	100	1.697.660.857	100	71.184.484	3,21	4.031.400	0,00	13.832.350	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	17.863.750	#DIV/0!	1.715.524.607	#DIV/0!	46,53		
		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		100,00	446.600.000	100,00	131.772.280	100	29.312.000	0,00	-	0,00	5.701.500	0,00	-	0	-	0,00	5.701.500	100	137.473.780	100,00	30,78	Dinas PMPTSP	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	384 Pelaku Usaha	100,00	1.676.221.950	100,00	1.100.710.914	100	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	1.100.710.914	#DIV/0!	65,67	Dinas PMPTSP	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 Kegiatan Usaha	100,00	1.106.599.825	100,00	465.177.663	100	41.872.484	9,63	4.031.400	19,42	8.130.850	0,00	0	0	0	29,05	12.162.250	129	477.339.913	129,05	43,14	Dinas PMPTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			100	2.404.249.775	100	630.519.025	100	10.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100	630.519.025	0,00	26,23		
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	2.404.249.775	100	630.519.025	100	10.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100	630.519.025	0,00	26,23		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah PJMD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)= 6+12		(14) = 13 / 5 * 100		(13)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															0,00										
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	100	2.404.249.775	100,00	630.519.025	100	10.000.000	0,00	-			0,00	-	0,00		0		0,00	0	100	630.519.025	100,00
							23.412.701.960		5.281.755.742	20,84	1.100.532.239	21,63	1.142.354.084	0,00	-	-	-	42,46	2.242.886.323	71	25.655.588.283		61,29		

Berikut akan diuraikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar sampai triwulan II tahun anggaran 2025:

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini belum dilaksanakan karena kegiatan promosi penanaman modal direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025
2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Telah dilaksanakannya kegiatan memberikan fasilitasi dengan melaksanakan rapat bersama stakeholder terkait serta para pelaku usaha sebanyak 4 pelaku usaha
3. Pengawasan Penanaman Modal
Pada triwulan II kegiatan ini belum terlaksana
4. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Kegiatan ini berupa pelayanan perizinan terhadap 8100 pelaku usaha dan pembayaran honor tim koordinasi layanan perizinan (PRN Perizinan) sampai dengan Triwulan II
5. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Kegiatan ini berupa menindaklanjuti pengaduan masyarakat
6. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Risiko
Kegiatan ini berupa survey perizinan terhadap 94 kegiatan usaha
7. Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Kegiatan berupa penyusunan dokumen Kepuasan Masyarakat Triwulan II
8. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Sampai dengan triwulan II telah disusun Rancangan Rencana Kerja PMPTSP Tahun 2026, Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025, DPA 2025, RKA dan DPA Pergeseran I tahun anggaran 2025.
9. Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP

Telah ditetapkan dokumen LKPJ, LPPD dan LKjIP Tahun 2024, laporan capaian kinerja triwulan I dan II serta laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulanan.

10. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Capaian kinerja kegiatan ini berupa pembayaran gaji 30 orang PNS.

11. Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD

Telah ditetapkan laporan Keuangan Tahun 2024.

12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pada triwulan II kegiatan ini belum terlaksana

13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Telah disediakan logistik kantor.

14. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Telah dilaksanakan proses penyediaan barang cetakan.

15. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Telah disediakan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat internal kantor dan makanan dan minuman bagi tamu .

16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Telah disusun laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 6 laporan.

17. Penyediaan jasa surat menyurat

Capaian kinerja kegiatan ini berupa laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1 laporan.

18. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Telah dilaksanakan pembayaran 6 Bulan tagihan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.

19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Telah disusun 6 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Telah dilaksanakan pemeliharaan dan pembayaran pajak 8 unit kendaraan dinas sampai triwulan II.

21. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian kinerja kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung kantor Dinas PMPTSP dan sedang berjalan.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1. Adanya komitmen dan maklumat pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas syaratnya, jelas tarifnya dan jelas waktu penyelesaiannya.
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai standar prosedur penyelesaian izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Terlaksananya koordinasi yang intensif dengan OPD teknis terkait.

Faktor-faktor yang memengaruhinya terjadinya permasalahan di dalam pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan yang dilakukan pada Mal Pelayanan Publik karena keterbatasan sarana dan SDM / personil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Keterbatasan anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Persetujuan/ keputusan teknis merupakan kunci terhadap dikabulkan/ ditolaknya permohonan perizinan oleh Tim Teknis. Namun hal ini sepertinya tidak dianggap penting oleh Pemerintah Daerah jika dilihat dari anggaran yang disediakan untuk proses persetujuan/ keputusan teknis tersebut

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/ pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian alat tulis kantor
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, diusulkan penambahan anggaran untuk bahan bakar minyak dan pelumas
3. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, adanya penambahan anggaran untuk belanja Alat Tulis Kantor penyelenggaraan MPP.
4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko adanya penambahan anggaran untuk belanja Alat Tulis Kantor
5. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya adanya penambahan anggaran untuk belanja Alat Tulis Kantor
6. Pengawasan Penanaman Modal adanya penambahan anggaran untuk belanja Alat Tulis Kantor
7. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik adanya penambahan anggaran untuk belanja Alat Tulis Kantor

Pada Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar mempunyai 5 (lima) Program 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (Dua puluh dua) Sub Kegiatan, Program dan Kegiatan untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR URUSAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							6.300.475.375,00	5.281.755.742,00	4.931.865.170,00	-1.368.610.205,00						10.562.458.930,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.300.475.375,00	5.281.755.742,00	4.931.865.170,00	-1.368.610.205,00							10.562.458.930,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.300.475.375,00	5.281.755.742,00	4.931.865.170,00	-1.368.610.205,00							10.562.458.930,00		
1 .	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	4.818.208.375,00	4.432.071.258,00	4.146.185.686,00	2.569.250.555,00							7.387.458.930,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	5.628.000,00	5.628.000,00	5.628.000,00	0,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatn ya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif		39.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBRE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	628.000,00	628.000,00	628.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	4.110.121.284,00	3.748.984.167,00	3.655.148.595	-454.972.689,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif		5.325.958.930,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.108.121.284,00	3.746.984.167,00	3.653.148.595,00	-454.972.689,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			5.313.958.930,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBRE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terbit Administrtasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	79.227.420,00	116.197.420,00	54.227.420,00	-15.000.000,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatn ya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif		584.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	- Paket	0,00	36.970.000,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	20 Paket	6.227.420,00	6.227.420,00	11.227.420,00	5.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA		PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Kel/Desa							PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	225.000.000,00	113.030.000,00	0,00	-225.000.000,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	-		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBRE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	- Unit	150.000.000,00	113.030.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	235.264.462,00	235.264.462,00	234.214.462,00	-1.050.000,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	-		348.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi					
	2.18.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.764.462,00	109.764.462,00	108.714.462,00	-1.050.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	162.967.209,00	212.967.209,00	206.967.209,00	44.000.000,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatn ya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif		470.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBRE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	111.590.409,00	111.590.409,00	146.590.409,00	35.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	111.590.409,00	111.590.409,00	146.590.409,00	35.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	111.590.409,00	111.590.409,00	146.590.409,00	35.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhab ilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	50.376.800,00	100.376.800,00	59.376.800,00	9.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3 ,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	cakupan upaya peningkatan realisasi investasi di daerah				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	200.000.000,00	181.700.000,00	61.700.000,00							450.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Promosi penanaman modal yang diikuti</i>				100 %	100 %	120.000.000,00	200.000.000,00	18 1.700.000,00	61.700.000,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatn ya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif		450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</i>				2 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	200.000.000,00	191.700.000,00	61.700.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4 ,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	cakupan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal				100 Persen	100 Persen	568.500.000,00	568.500.000,00	535.760.000,00	231.500.000,00							800.000.000,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu				100 %	100 %	568.500.000,00	568.500.000,00	535.760.000,00	-32.740.000,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	535.000.000,00	535.000.000,00	518.162.000,00	-16.838.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				75 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	3.500.000,00	3.500.000,00	1.800.000,00	-1.700.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBRE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				350Kegiatan n Usaha	20Kegiatan Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	15.798.000,00	-14.202.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5 ,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal				100 Persen	100 Persen	783.767.000,00	71.184.484,00	52.889.484,00	-83.767.000,00							700.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Realisasi Investasi				100 %	100 %	783.767.000,00	71.184.484,00	52.889.484,00	-730.877.516,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatn ya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif		700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan Usaha.	4 Kegiatan Usaha.	117.564.000,00	29.312.000,00	16.697.000,00	-100.867.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	431.074.000,00	0,00	0,00	-431.074.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				120 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	235.129.000,00	41.872.484,00	36.192.484,00	-198.936.516,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase cakupan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang disusun				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.330.000,00	515.000.000,00							525.000.000,00		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.330.000,00	-4.670.000,00			-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif		525.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.330.000,00	-4.670.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi			525.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		J U M L A H							6.300.475.375,00	5.281.755.742,00	4.931.865.170,00	-	73.604.457.626,00						10.562.458.930,00	

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2025, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Tanah Datar serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maupun SKPD yang membidangi fungsinya.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

Batusangkar, Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOFA NOFA BUDIANTO,SH
NIP. 19740612 199403 1 005



